Lampiran

Catatan Koalisi Masyarakat Sipil atas Situasi Pelindungan Lingkungan Hidup, Demokrasi, dan HAM

(Landasan atas pernyataan sikap dan seruan Koalisi Pilih Pulih)

1. **Lemah komitmen stop deforestasi, lindungi gambut, dan transisi energi untuk mengatasi krisis iklim.** Sektor hutan dan lahan *(FoLU)* serta energi di Indonesia merupakan dua penyumbang besar emisi gas rumah kaca Indonesia–yang memicu krisis iklim. Sayangnya, komitmen pemerintah untuk menghentikan deforestasi, melindungi gambut, dan melakukan transisi energi amat lemah. Analisis Greenpeace menemukan, sepanjang 2014-2022, angka deforestasi mencapai 3,4 juta hektare (ha). Deforestasi juga masih terus mengancam Tanah Papua, merampas ruang hidup dan hutan masyarakat adat.

   Kegagalan pemerintah melindungi gambut juga berimbas pada kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir saban tahun. Pantau Gambut 2023 mencatat, dari 24,2 juta ha Kesatuan Hidrologis Gambut di Indonesia, sekitar 16,4 juta di antaranya berada pada kerentanan karhutla tingkat sedang dan tinggi–termasuk akibat beban konsesi. Tanpa pelindungan lingkungan yang konkret, seperti meninjau ulang seluruh izin konsesi di area KHG, terutama yang pernah terbakar ulang, melakukan eksekusi putusan kasus karhutla, serta mencabut kebijakan-kebijakan yang destruktif terhadap lingkungan, kematian jiwa dan kerusakan ekosistem akan menjadi satu-satunya warisan tiap rezim bagi generasi mendatang.

   Di sektor energi, pemerintah masih tak mendukung penuh inisiatif warga untuk energi terbarukan, tapi memberi banyak kemudahan bagi pengusaha, baik badan usaha milik negara maupun swasta-asing, dengan berbagai kebijakan dan insentif. Sejumlah proyek pembangunan yang diklaim demi transisi energi nyatanya justru merampas wilayah masyarakat dengan menggunakan kekerasan yang melibatkan aparat, seperti yang terjadi di Rempang. Corak transisi energi ala pemerintah tetap mempertahankan ego elite dan kepentingan menguasai sumber daya energi serta memperkaya diri mereka sendiri.

   Para paslon yang maju di Pilpres 2024 juga belum melepaskan ketergantungan Indonesia dari jebakan energi fosil seperti batu bara. Skema transisi energi para paslon masih mempertahankan solusi palsu dalam menangani krisis iklim dan kerusakan lingkungan. Mereka menyebutnya transisi hijau yang rendah karbon, tapi pilihan teknologinya tetap melanggengkan bahan bakar fosil seperti CCS/CCUS, gas fosil, dan batu bara. Orientasinya masih berskala besar dan tersentralisasi, metodenya tetap menambah emisi, dengan niat melanjutkan eksploitasi hutan dan monokulturisasi untuk bioenergi,

pembongkaran gunung-gunung untuk membangun ekosistem pembangkit geothermal, serta pesisir-pesisir untuk ekosistem nikel.

Secara keseluruhan, para kandidat belum memprioritaskan penanganan krisis iklim sebagai fokus utama dalam pembangunan. Penanganan krisis iklim masih memakai pendekatan sektoral dan belum mencapai perubahan sistemik yang diperlukan. Padahal krisis iklim bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga hak asasi manusia. Perlu komitmen kuat dari capres-cawapres untuk menangani isu ini secara komprehensif dan holistik, yang memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Langkah awal dimulai dengan memastikan keselamatan manusia (*human security*), utang ekologis (*ecological debt*), hak atas tanah (*land tenure*), serta memperbaiki sistem produksi dan konsumsi yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan dalam RUU Keadilan Iklim.

2. **Satu dekade tetap memunggungi laut.** Kerusakan lingkungan juga terjadi di laut, kawasan pesisir, dan pulau-pulau kecil. Sekitar 12 ribu (14 persen) desa di Indonesia berada di pesisir, dan sebanyak 90 persen masyarakat pesisir hidup dari sumber daya pesisir dan laut. Namun dalam 20 tahun terakhir, pemerintah mengabaikan hak-hak masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil lewat model pembangunan yang eksploitatif. Merujuk laporan Jatam (2019), setidaknya ada 55 pulau kecil di Indonesia yang terdampak tambang. Ini jelas akan memicu kerusakan permanen yang membuat kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil–yang sudah terancam kenaikan muka air laut akibat krisis iklim–tenggelam lebih cepat.

   Rezim ke depan harus memenuhi hak asasi nelayan dan mengedepankan agenda adaptasi perubahan iklim yang berkeadilan dengan mereduksi eksploitasi dan perombakan wilayah pesisir secara drastis. Pemenuhan hak atas ruang hidup nelayan dan warga pesisir, disertai upaya perbaikan ekosistem yang melindungi ruang hidup warga pesisir, adalah sebuah keharusan yang tak dapat ditunda.

3. **Model pembangunan pemerintah memicu banyaknya konflik agraria.** Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, dalam sembilan tahun pemerintahan Jokowi (2015-2023), ada 2.939 letusan konflik agraria seluas 6,3 juta hektare yang berdampak terhadap 1,75 juta rumah tangga. Banyak warga juga menjadi korban kriminalisasi dan kekerasan aparat hukum dan bersenjata. Sedikitnya 2.442 petani, nelayan, masyarakat adat, dan perempuan dikriminalisasi; 905 orang mengalami kekerasan; 84 orang tertembak; dan 72 orang tewas karena mempertahankan tanahnya.

   Tingginya konflik agraria ini tak terlepas dari ketimpangan penguasaan tanah, termasuk pengalokasian tanah bagi pengusaha melalui kebijakan-kebijakan seperti bank tanah dan *forest amnesty.* Ribuan konflik agraria tersebut pun membuktikan bahwa pemerintah tidak memiliki kebijakan penyelesaian yang berkeadilan atas konflik agraria akibat operasi bisnis

yang merampas tanah. Bahkan perampasan tanah selama ini cenderung dilindungi secara hukum demi kepentingan investasi.

4. **Konflik agraria dan gagalnya kedaulatan pangan.** Tidak adanya penyelesaian konflik agraria dalam kerangka pelaksanaan reforma agraria berdampak pada tak tercapainya kedaulatan pangan Indonesia. Tanah-tanah pertanian pangan menjadi sasaran utama proyek pemerintah dan pengusaha. Sejak 2015-2023 sedikitnya 1 juta hektare sawah hilang (Mapbiomas-Auriga, 2023). Korporatisasi pertanian skala besar seperti *food estate* bukanlah jawaban, karena justru menggeser peran petani, nelayan, petambak, dan peternak sebagai produsen pangan yang utama.

   Kegagalan pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan terbukti pula dengan ketiadaan kontrol terhadap ambisi impor pangan para pengusaha. Badan Pusat Statistik mencatat, impor beras pada 2023 mencapai 7,53 juta ton. Impor pangan selama ini pun tak mampu menjangkau daerah yang memiliki risiko kelaparan tinggi. Buktinya selama 2015-2022, sedikitnya 93 orang di Papua meninggal dunia dan ribuan lainnya mengalami gangguan kesehatan karena mengalami kelaparan ekstrem (Kompas & BBC, 2015-2022). Pada pemerintahan ke depan, kebijakan *food estate* dan impor pangan yang bersifat anti-reforma agraria harus dievaluasi menyeluruh dan dihentikan.

5. **Krisis multidimensi di perkotaan.** Kawasan perkotaan merupakan tempat hidup 56,7 persen (BPS) populasi di Indonesia. Namun demikian, konsep kawasan kota layak hidup sering kali diabaikan oleh pemerintah atau pasangan kandidat yang sedang bertarung di Pemilu 2024. Pembangunan di kawasan perkotaan kerap tidak menghitung daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Polusi udara dan akses terhadap air bersih selalu menjadi permasalahan masyarakat yang hidup di kawasan perkotaan. Oleh karenanya, pemerintah yang akan datang perlu lebih serius dalam menangani isu perkotaan dengan berfokus pada penyusunan dan penetapan rencana pelindungan dan pengelolaan mutu udara dan air baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota sebagai fondasi penyusunan kebijakan, serta secara konsisten melakukan penegakan hukum terhadap industri di dalam dan sekitar kota yang mencemari udara maupun air.

   Pencemaran udara di wilayah perkotaan seperti Jakarta, sebagian besar disumbang dari sektor transportasi. Menurut European Cyclists' Federation, bersepeda, dikombinasikan dengan angkutan massal berbasis listrik yang semakin luas, bisa mengurangi emisi di sektor itu hingga 15 persen. Bersepeda untuk mobilitas sehari-hari di perkotaan penting didorong, bahkan wajib menjadi bagian dari kebijakan iklim, ketimbang sepenuhnya bergantung pada peralihan kendaraan pribadi dari yang berbahan bakar fosil ke yang bertenaga listrik. Ini tugas presiden berikutnya. Sayangnya, aksi iklim yang dijalankan justru

memfasilitasi pencemar untuk terus mencemari udara melalui solusi-solusi palsu yang ditawarkan.

Selain persoalan polusi udara, timbulan sampah juga menjadi hal yang perlu diatasi pemimpin terpilih. Kebijakan tata kelola sampah perlu dipahami sebagai isu multisektor, yang berkaitan dengan perubahan iklim, tata kota, dan kesehatan masyarakat. Pendekatan untuk menyelesaikan masalah ini harus komprehensif dan tidak hanya berfokus di hilir saja. Dampak dari buruknya tata kelola sampah terlihat pada sampah yang tercampur yang dibuang ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) mengakibatkan TPA kebakaran. Berdasarkan data Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI), sepanjang tahun 2023 terdapat 38 TPA terbakar. Perlu perbaikan fundamental terhadap tata kelola pengelolaan sampah yang berfokus salah satunya pada menetapkan target dan peta jalan pengurangan produksi dan konsumsi plastik nasional, mengatur desain dan pola produksi barang dan kemasan agar mudah dipilah, didaur ulang dan diguna ulang, serta menetapkan pengelolaan sampah sebagai layanan dasar melalui perubahan UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

6. **Hak-hak buruh migran.** Selama ini kita lebih banyak mendengar kabar buruk ketimbang kabar baik soal nasib buruh migran asal Indonesia. Hidup di negeri orang, sulit dipantau keselamatannya, lebih banyak yang berakhir menjadi korban daripada kisah inspiratif nan heroik. Sepanjang tahun 13 tahun terakhir, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) setidaknya mencatat penanganan sebanyak 5.664 kasus. Dari jumlah tersebut, tiga jenis kasus tertinggi datang dari Pekerja Rumah Tangga (PRT), Awak Kapal Perikanan (AKP), dan buruh migran di sektor pabrik.

   Sampai hari ini, implementasi pelindungan yang dimandatkan Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan tata kelola penempatan dan pelindungan yang lebih baik bagi pekerja migran dan keluarganya. Sebagai salah satu negara dengan jumlah buruh migran terbanyak di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyelesaikan sengkarut masalah yang menjerat buruh migran. Padahal, di sisi lain buruh migran kerap diglorifikasi sebagai “pahlawan devisa”. Remitansi Indonesia yang diberikan oleh buruh migran kepada negara bisa mencapai Rp151,54 triliun—sama dengan pemasukan yang ada di bisnis sektor migas atau tambang.

   Dengan ini, negara harus memperhatikan secara serius apa yang sebenarnya dialami oleh buruh migran Indonesia dan mengambil kebijakan strategis. Masalah-masalah yang perlu diperhatikan antara lain (a) buruknya pengawasan sejak pra penempatan, (b) buruknya tata kelola penempatan dan pelindungan dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa (c) di sektor AKP (awak kapal perikanan) Migran, masih ada dualisme perizinan antara SIP3MI oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan SIUPPAK oleh Kementerian Perhubungan (d) Masih buruknya implementasi kewenangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai Desa dalam memberikan pelindungan terhadap PMI karena terkendala anggaran (e) kondisi kerja yang tidak layak, (f) eksploitasi, (g) diskriminasi, (h) status imigrasi dan permasalahan hukum, (i) kesehatan dan kesejahteraan mental.

7. **Pengabaian kelompok marjinal.** Kebijakan pembangunan dan ekonomi yang berwatak patriarkis membuat perempuan dan kelompok dengan beragam gender dan orientasi seksual mengalami kekerasan yang berlapis, mulai dari lingkar terdekatnya hingga kekerasan struktural yang dilakukan negara secara sistematis. Pemiskinan, beban ganda, diskriminasi, kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual hampir setiap hari menjadi pemberitaan di media massa. Pada ranah politik, perempuan tidak lebih hanya ditempatkan sebagai komoditas pendulang suara, hampir semua partai politik dan penyelenggara pemilu bahkan gagal memastikan politik afirmasi bagi perempuan.

8. **Pengabaian hak-hak anak muda.** Masalah pendidikan menjadi salah satu komoditas politik di Pemilu 2024, tanpa ada program prioritas. Padahal Pemilu kali ini didominasi oleh anak muda, yakni 55 persen generasi milenial dan generasi Z (Gen Z), atau sekitar 113,6 juta orang. Isu pendidikan menjadi begitu penting untuk memajukan sumber daya manusia di Indonesia. Masalah komersialisasi pendidikan, kurikulum yang tidak ilmiah, hingga angka putus sekolah yang tinggi, tidak mampu ditangani. Pemuda mahasiswa terus kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas.

   Banyak pemuda dan anak-anak berpendidikan sangat rendah karena tidak memiliki akses khususnya terhadap pendidikan menengah dan tinggi. Rata-rata usia pendidikan Indonesia hanya 9 tahun. Pusat dari pendidikan yang rendah berada di pedesaan. Pemuda di pedesaan tidak memiliki kontrol atas tanah, mayoritas pengangguran, hanya sedikit yang bekerja di lahan terbatas milik orang tuanya. Sedangkan mayoritas terserap bukan ke dalam lembaga pendidikan, namun bekerja di lahan milik tuan tanah dan dipaksa bekerja dengan alat kerja yang sangat tradisional. Tidak ada kemajuan berarti dalam produksi, pengetahuan dan keterampilan.

   Sementara di perkotaan, pemuda dengan tingkat pendidikan yang rendah menjadi sasaran bagi industri milik borjuasi besar. Badan Pusat Statistik mencatat, pengangguran terbuka dari lulusan Sekolah Dasar sebesar 3,6 persen sedangkan pengangguran jenjang SMA/SMK mencapai 23,3 persen. Akibat dari industri di perkotaan yang hanya berbentuk manufaktur, olahan setengah jadi, rakitan dengan menggunakan mesin kuno dan teknologi rendah, serta kondisi kerja buruk dan upah murah, maka tidak akan pernah ada kemajuan bagi masa depan pemuda mahasiswa.

   Dengan tidak diperhatikannya masalah pendidikan dan isu lainnya di kalangan generasi muda secara fundamental, pemuda mahasiswa akan tetap menjadi objek, dipaksa untuk menjadi pekerja serabutan/*freelance,* buruh manufaktur maupun sektor jasa dengan upah murah. Dengan kondisi tersebut, pemuda, mahasiswa, pelajar dan kalangan intelektual lainnya tidak akan pernah menemukan pijakan untuk kehidupan yang ilmiah, demokratis, maju dan profesional.

9. **Demokrasi dan HAM berjalan mundur.** Dalam beberapa tahun ke belakang, situasi demokrasi di Indonesia terus saja memburuk, ditandai dengan penyempitan ruang kebebasan sipil yang disertai ancaman dan intimidasi terhadap mereka yang kritis terhadap pemerintah. Situasi ini diafirmasi melalui berbagai hasil publikasi laporan terkait indeks demokrasi di berbagai negara, misalnya datai *Economist Intelligence Unit* (EIU) yang menyatakan kinerja demokrasi Indonesia bergerak stagnan. Indonesia menempati angka 6,71 poin dan masih belum bergerak dari kategori demokrasi cacat (*flawed demokrasi*). Begitupun jika merujuk data dari Freedom House yang kembali menunjukan penurunan angka di tahun 2023 dengan 58/100. Adapun komponen signifikan yang menyebabkan rendahnya angka ini yakni kebebasan sipil (*civic space*). Indonesia pun belum dapat memperbaiki situasi dengan keluar dari klasifikasi negara yang tergolong *partly free*.

   Walaupun pemerintahan Presiden Joko Widodo terus menyatakan bahwa perlindungan HAM merupakan salah satu prioritas, nyatanya terdapat kemunduran dalam penegakkan HAM dan reformasi hukum. Pemerintah pun belum kunjung berhasil menuntaskan agenda penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Presiden tampaknya tidak berniat dan memiliki kehendak politik untuk membawa para pelaku ke pengadilan sehingga fenomena impunitas terus terjadi. Proses pengungkapan kebenaran terhadap pelanggaran HAM berat pun tidak dilakukan secara menyeluruh sehingga keadilan substantif gagal terlaksana.[1]

   Rapor buruk Indonesia juga terjadi dalam perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, terutama terhadap mereka yang vokal mengkritik kebijakan negara. Tahun 2023 menjadi tahun tertinggi serangan terhadap pembela hak-hak asasi manusia, perempuan, lingkungan, dan masyarakat adat. Banyak dari kasus serangan terhadap pembela HAM terjadi akibat proyek pembangunan yang dilaksanakan tanpa adanya partisipasi dan konsultasi bermakna dengan masyarakat terdampak, seperti di Maluku, Kalimantan, dan Papua.[2]

   Lebih lanjut, kasus *Strategic Litigation Against Public Participation* (SLAPP) di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022. Tercatat kasus SLAPP pada tahun 2022 merupakan yang tertinggi dengan total 26 kasus. Beberapa regulasi dan kebijakan yang telah ada seperti Pedoman Jaksa Agung No. 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup telah mengatur terkait pejuang hak atas lingkungan hidup. Namun diperlukan komitmen politik untuk menjamin hak untuk memperjuangkan lingkungan hidup, terlebih di tengah ancaman dampak dari perubahan iklim yang semakin nyata terasa di tengah masyarakat.

---

[1] Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Catatan Hari HAM 2023: HAM Dalam Manipulasi dan Cengkraman Hegemoni Kekuasaan, https://kontras.org/2023/12/10/catatan-hari-ham-2023-ham-dalam-manipulasi-dan-cengkraman-hegemoni-kekuasaan/

[2] Amnesty International Indonesia, Refleksi dan Proyeksi HAM: Pilpres 2024, momen pertaruhan eksistensial hak asasi manusia Indonesia. Selengkapnya: https://s.id/refleksiHAM2023